

Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening

Fadilatul Saidah^{1*}, Maslichah², M. Cholid Mawardi³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: fadilatulsaidah@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of balancing funds and capital expenditure on regional government financial performance through local original income (empirical study of city/district regional governments in East Java province). The variables used in this research are balancing funds and capital expenditure (dependent variable). The independent variable is the financial performance of the regional government, while the intervening variable is local original income. The results of this research show that the Balancing Fund variable is on Regional Government Financial Performance, the Capital Expenditure variable is on Regional Government Financial Performance, the Balancing Fund is on Regional Original Income, Capital Expenditure is on Regional Original Income and Original Regional Income is on Regional Government Financial Performance.

Keywords: *Balancing funds, capital expenditures, regional government financial performance and regional original income*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa otonomi daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya serta memberikan pelayanan dan pembangunan dengan mengembangkan potensi yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Mengenai adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik sehingga dapat tercapainya penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah.

Agar tercapainya kinerja pemerintah daerah dibutuhkan adanya evaluasi untuk memperbaiki kesalahan yang ada dalam pembuatan keputusan. Aspek finansial dalam pengukuran kinerja mulai jarang digunakan, karena hanya mengejar tujuan profitabilitas jangka pendek saja. Jika pemerintah tidak berorientasi pada profitabilitas, maka sangat diperlukan ukuran-ukuran yang lebih komprehensif (Aulia, 2018). Untuk itu, bisa dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi celah signifikan untuk memaksimalkan keuangan daerah. Hal ini diperlukan karena hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberi perspektif tambahan bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah (Maulina, 2021)

Pada tahun 2020 Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur mencapai 104,94 persen yang didapat dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 116,20 persen, Pendapatan Transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 100,56 persen serta belanja daerah 93,41 persen. meskipun pada saat itu masa pandemi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap bisa mencapai target dari yang dianggarkan dengan melakukan peningkatan target pendapatan daerah, pembangunan dan pelayanan publik, mengembangkan kebijakan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan, serta melakukan upaya perluasan sumber-sumber pendapatan. Hingga pada tahun 2021-2022 Pendapatan Daerah terus mengalami kenaikan, seperti yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa capaian kinerja Pemprov

Jatim 2022 dalam 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) kepada DPRD Jatim. Dia juga sampaikan keberhasilan lainnya. Dari sisi pendapatan daerah, Pemprov Jatim berhasil merealisasikan pendapatan daerah 2022 Rp 31,90 triliun atau mencapai 107,92 persen. Angka ini melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp 29,56 triliun. Beliau juga menuturkan "Jika dilihat dari persentase capaian maka pendapatan daerah TA 2022 meningkat dari tahun lalu (2021) dengan persentase capaian pendapatan daerah sebesar 103,98 persen. Secara keseluruhan capaian realisasi komponen PAD tahun 2022 berhasil melampaui capaian tahun 2021". Di sisi pembelanjaan, Khofifah juga menyebut Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2022, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp 33,60 triliun tercatat mampu direalisasikan sebesar Rp 31,50 triliun atau sekitar 93,76%. Capaian ini juga berhasil melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 92,44% Sebelumnya, Khofifah menyampaikan capaian kinerja Pemprov Jatim 2022 yang menurutnya sangat membanggakan. Dari total 2.912 indikator program, disebut 97,70% yang sudah tercapai dan berhasil. Capaian kinerja tahun 2022 ini tercatat meningkat 1,29% dari tahun 2021 yang sebesar 96,41% (www.detik.com).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Scot (2015:358) Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan atau kontrak antara principal dan agent, di mana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Fajar & Rohman (2012) kinerja keuangan merupakan penilaian kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Pendapatan Asli Daerah

Purnomo (2009:34) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

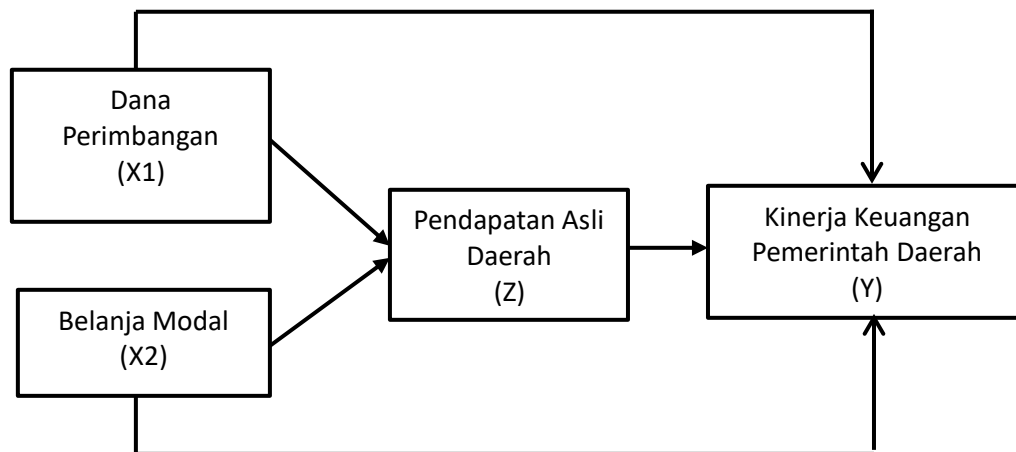
Dana Perimbangan

Widjaja (2008:129) Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Belanja Modal

Halim (2007:101) "Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H1: Dana Perimbangan berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
 H2: Belanja Modal berpengaruh langsung terhadap Kinerja Pemerintah Keuangan Pemerintah Daerah.
 H3: Dana Perimbangan berpengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah.
 H4: Belanja Modal berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah.
 H5: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi Dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kausal, penelitian ini dilakukan melalui situs resmi website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia secara online dengan mengakses Anggaran Daerah Tahunan tahun 2020-2022 dengan waktu penelitian dimulai pada bulan november 2023 sampai Juni 2024.

Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi pemerintah sebanyak 38 Kabupaten/ Kota dengan rincian 29 Kabupaten dan 9 Kota, Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode *Puspositive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu Sugiyono, (2016: 85).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Perimbangan	114	569370	4508810	1467146,930	586695,802
Belanja Modal	114	69350	1766030	376695,965	313213,925
Pendapatan Asli Daerah	114	131840	5314700	553670,447	766228,597
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	114	102	51694	11076,447	6592,223

Sumber: Data Olahan,2024.

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa statistik deskriptif pada variabel Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 569370 dengan nilai maksimum sebesar 4508810 dengan nilai mean (rata-rata) sebesar 1467146,930 dan standar deviasi sebesar 586695,802. Pada variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 69350 dengan nilai

maksimum sebesar 1766030 dengan nilai mean (rata- rata) sebesar 376695,965 dan standar deviasi sebesar 313213,925. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 131840 dengan nilai maksimum sebesar 5314700 dengan nilai mean (rata-rata) sebesar 553670,447 dan standar deviasi sebesar 766228,597. Pada variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai minimum sebesar 102 dengan nilai maksimum sebesar 51694 dengan nilai mean (rata-rata) sebesar 11076,447 dan standar deviasi sebesar 6592,447.

Analisis Partial Least Square (PLS)

Outer Model

Berdasarkan gambar dijelaskan bahwa hampir keseluruhan korelasi antar variabel tidak signifikan, nilai hubungan diketahui untuk pengaruh Dana Perimbangan (X1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memperoleh nilai statistik sebesar 0,219. Variabel Belanja Modal (X2) terhadap Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memperoleh nilai statistik sebesar 0,206. Variabel Dana Perimbangan (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Z) memperoleh nilai Statistik sebesar 0,172 Variabel Belanja Modal (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Z) memperoleh nilai statistik sebesar 0,823, Pendapatan Asli Daerah (Z) terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Y) memperoleh nilai statistik sebesar 0,616.

Inner Model

Berdasarkan gambar diketahui untuk pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh nilai statistik sebesar 2,381, variabel Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh nilai statistik sebesar 1,900, variabel Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah memperoleh nilai Statistik sebesar 0,937, variabel Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli daerah memperoleh nilai statistik sebesar 3,963, dan Pendapatan Asli Daerah Kinerja keuangan Pemerintah daerah memperoleh nilai statistik sebesar 3,700.

R-Square

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	0,461	0,446
Pendapatan Asli Daerah	0,496	0,487

Berdasarkan sajian pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai R Square model jalur 1 dari variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar yang artinya bahwa variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Dana Perimbangan dan Belanja Modal sedangkan 34% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini Sedangkan Nilai R Square model jalur 2 dari variabel Pendapatan Asli Daerah 0,496 (49%) yang artinya bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Dana Perimbangan dan Belanja Modal melalui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan sisanya 51% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

	<i>Sample Original</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Sample Deviation</i>	<i>Sample Statistic</i>	<i>Sample Values</i>
Dana Perimbangan-Kinerja Keuangan Pemda	-0,219	-0,222	0,092	2,381	0,018
Belanja Modal-Kinerja Keuangan Pemda	0,206	0,210	0,108	0,1900	0,058
Dana Perimbangan-PAD	-0,172	-0,131	0,184	0,937	0,349
Belanja Modal-PAD	0,823	0,787	0,208	3,963	0,000
PAD-Kinerja Keuangan Pemda	0,616	0,568	0,166	3,700	0.000

Sumber: Data Olahan, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan sebuah hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh hasil bahwa nilai *t statistic* sebesar 2,381 dengan nilai *p value* 0,018 <0,05. Artinya H_1 ,

diterima dan H_0 ditolak, hal ini dapat diartikan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga semakin tinggi dana perimbangan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat karena pemanfaatan dana yang efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Estetika (2015) yang berpendapat bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadani et.al (2022) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh hasil bahwa nilai t statistic sebesar 1,900 dengan nilai p value $0,058 > 0,05$, Artinya H_2 ditolak dan H_0 diterima, hal ini dapat diartikan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,

Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak digunakan untuk aset yang produktif karena Penyaluran belanja modal kepada aset produktif dipandang sangat perlu untuk dilakukan sebab hal itu akan memicu maksimalisasi potensi daerah, khususnya pada area pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rochmah (2015) yang menyatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar dan Abdul (2012) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh hasil bahwa nilai t statistic sebesar 0,973 dengan nilai p value $0,348 > 0,05$. Artinya H_3 ditolak dan H_0 diterima, hal ini dapat diartikan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana bantuan yang kurang dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan sehingga pendapatan aslinya kurang terealisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewata (2021) yang berpendapat bahwa dana perimbangan tidak dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah atau tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasulong, L. (2012) yang berpendapat bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh hasil bahwa nilai t statistic sebesar 3,063 dengan nilai p value $0,000 < 0,05$. Artinya H_4 diterima dan H_0 ditolak, hal ini dapat diartikan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan belanja modal suatu daerah maka pemerintah dapat menciptakan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Melalui infrastruktur tersebut, pemerintah juga dapat melakukan pemungutan dalam bentuk retribusi atau pajak kepada masyarakat sebagai bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Danwis (2014) yang menyatakan Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

dan tidak sejalan dengan penelitian penelitian Hastuti (2018) menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh hasil bahwa nilai t statistic sebesar 3,700 dengan nilai p value $0,000 < 0,05$. Artinya H_5 diterima dan H_0 ditolak, hal ini dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kegiatan ekonomi yang baik di wilayah tersebut karena semakin tinggi pendapatan asli daerah akan sangat mendukung pertumbuhan kinerja untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Apridiyanti (2016) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten dan Kota di Jawa Barat tahun 2013-2017. Namun tidak sejalan dengan penelitian Fajar dan Abdul (2012) yang berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Tetapi sejalan dengan penelitian Sari & Mustanda (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil uji yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Belanja Modal tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Dana Perimbangan tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Belanja Modal berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini hanya dilakukan dengan rentang waktu selama tiga tahun yaitu 2020-2022.
2. Pada peneliti ini hanya melakukan penelitian di Jawa Timur.
3. Pada penelitian ini hanya meneliti tiga variabel yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah sehingga masih banyak variabel lain yang berpengaruh yang belum diteliti.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya di sarankan menambah rentang waktu penelitian minimal 4 sampai 5 tahun terakhir supaya pengujian lebih detail dan akurat dalam hasil dan analisisnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian seperti 10 kota besar di Indonesia atau seluruh provinsi di Indonesia sehingga akan mengetahui lebih luas dan perbedaan PAD dan kinerja keuangan daerah di Indonesia 3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel seperti tingkat kekayaan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ukuran pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A. (2018) Pengaruh Ukuran Daerah, Tingkat Ketergantungan dengan Pusat, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
<https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.62916>,
- Dewata, E., Sari, Y., & Nouvanti, F. (2021). *The effect of locally generated revenue as an intervening variable on the financial performance of the regional government of South Sumatra province*.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi Diponegoro, Volume 1, No. 2.
- Mutiaranisa. Estetika. (2015). "Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, PDRB, dan IPM terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- HASTUTI, S. D (2018). PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA KEUANGAN PADA BPKPAD PEMERINTAH.
<https://kominformojatimprov.go.id/berita/bacakan-lkpi-2022-di-dprd-gubernur-khofifah-capaian-kinerja-pemprov-jatim-97-70-persen>
- Prof. Dr.Haw Widjaja. (2008). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Jakarta:Rajawali Pers
- Purnomo, B. S. (2009). Obligasi Daerah. Bandung: Alfabeta
- Ramadani, A. F., & Muslimin. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2016-2020. Journal of Management and Bussines (JOMB), 4(1), 362-372.
<https://doi.org/10.31539/jomb.v4i1.3710>.
- Rasulong, 1. (2012). Implikasi Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Pendapatan. Asli Daerah Kabupaten Takalar.
- Rochmah, Siti Nur and, Dr. Zulfikar, S.E., M.Si (2015) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2012) Skripsi thesis, Universitas Surakarta.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja nerja Keuangan Universitas Pemerintah Daerah. EJurnal Manajemen Udayana, 8(8),
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.108.p02.4759>.
- Scott, W. R. 2015. Financial Accounting Theory. 7th Edition.Printice Hall.United States of America
- Sugiyono, (2014). Metode penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d. Bandung Alfabeta, cetakan 14, 13.
- Wadjaudje, D. U., Susanti, S., & Pahala, 1. (2018). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, 5(2), 105-128.